

# ALBUM FOTO PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

AGASTYA RAMA LISTYA

## PENGANTAR

Pendidikan nasional Indonesia merupakan salah satu topik yang senantiasa menarik untuk didiskusikan, entah itu berkaitan dengan pesimisme terhadap kualifikasi para guru; ataukah dengan keprihatinan terhadap mata pelajaran yang terlalu banyak dan membebani murid; ataukah dengan metode pengajaran yang tidak memberi ruang terhadap kreatifitas dan kekritisn siswa; ataukah dengan penyusunan kurikulum yang bersifat sentralistik, dll. Membicarakan pendidikan di Indonesia ibaratnya membicarakan sebuah album foto. Seribu satu permasalahan terpantul dari balik album foto tersebut. Pendidikan yang seyogyanya merupakan alat untuk memanusiakan manusia (hominisasi dan humanisasi)<sup>1</sup> ternyata dalam praktiknya masih jauh panggang dari api. Data terakhir yang diperoleh dari UNDP justru semakin memperjelas kekaburan wajah pendidikan kita. Dalam laporannya yang termaktub dalam *The National Human Development Report* tahun 2004 UNDP menempatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia pada peringkat ke-111 dari 174 negara.<sup>2</sup> Dengan peringkat yang demikian rendah, bisa diasumsikan tidaklah mengherankan bila Indonesia belum berhasil keluar dari krisis ekonomi dan sosial yang berlangsung.

Melalui artikel ini penulis tertarik untuk mengajak kita semua membuka kembali album foto pendidikan nasional Indonesia. Lembaran lama merupakan saksi sejarah yang menceritakan tentang problema-problema mendasar di seputar penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Sementara lembaran

---

<sup>1</sup> H.A.R. Tilaar., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, P.T. Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hal. 54

<sup>2</sup> Mas'ud Machfoeds, *Pendidikan Dasar Harus Tetap menjadi Prioritas*, Harian Umum Kedaulatan Rakyat tanggal 2 September 2004, hal. 10

baru adalah lembaran kosong yang perlu diisi dengan foto-foto yang menarik dari wajah pendidikan nasional Indonesia di masa mendatang.

## **MEMBUKA LEMBARAN LAMA**

### **Alokasi Dana Pendidikan yang Minim**

Prof. Dr. Sudarwan Danim dalam bukunya *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*<sup>3</sup>, menganggap bahwa pemerintah belum cukup berkomitmen untuk mendanai pendidikan. Bahkan ironisnya pendidikan yang diyakini sebagai salah satu wahana untuk membebaskan bangsa Indonesia dari krisis yang berkepanjangan, dalam sejarah perjalanan bangsa ini pernah hanya dianggarkan sebesar 6,7% dari total APBN, yaitu pada tahun 1999/2000. Demikian pula berdasarkan riset yang dilakukan oleh harian umum Suara Merdeka diinformasikan bahwa sebagian besar kota/kabupaten di Jawa Tengahpun hingga tahun 2006 masih belum dapat memenuhi angka minimal anggaran biaya pendidikan sebesar 20% dari jumlah total APBD.

### **Ganti Menteri, Ganti Kurikulum**

Mungkin hanya di Indonesia saja perubahan kurikulum terjadi begitu cepat dan tidak berkesinambungan. Mereka yang terpilih sebagai menteri Pendidikan Nasional (mendiknas) berlomba-lomba meninggalkan kenangan monumental pada saat menjabat dengan mengeluarkan kebijakan baru yang justru samasekali tidak berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.<sup>4</sup> Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para mendiknas selain pada

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2003, hal. 6 – 8

<sup>4</sup> Ardi Hamzah, *Makin Kusutnya Pendidikan di Negeri Ini*, Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 8 Desember 2004, hal 11

dasarnya merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan politis yang ada juga mencerminkan ketiadaan visi pendidikan yang jelas.

Pada saat menjabat sebagai mendiknas Kabinet Pembangunan VI, Wardiman Djojonegoro memberlakukan kurikulum 1994. Pada saat itu pemerintah Orde Baru mengangkat isu pembangunan ekonomi, yang konon hanya menguntungkan segelintir orang, menjadi agenda utama, sehingga yang terjadi bahwa tujuan pendidikan diarahkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan pasar (*market-driven education*). Salah satu jargon penting yang diorbitkan oleh Wardiman Djojonegoro pada masa itu adalah *link-and-match* (taut dan padan). Banyak pihak menuding kurikulum 1994 terlalu sarat dengan isi dan memandang peserta didik sebagai kertas putih yang perlu ditulisi dengan sejumlah ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Kemudian pada tahun 2002 tatkala reformasi bergulir, Abdul Malik Fadjar memperkenalkan konsep kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum KBK menghilangkan Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dianggap terlalu indoktrinatif, serta memberi tekanan pada pengembangan kompetensi siswa didik dan perbedaan kemampuan setiap individu dalam kelas. Dalam praktiknya KBK yang penyusunannya bersifat desentralistik dinilai terlalu membebani para guru dengan berbagai parameter penilaian yang ada. Selain itu kelemahan lain dari penerapan KBK adalah ketidaksiapan guru. Ada banyak guru yang tidak memahami konsep KBK dengan baik, sehingga yang terjadi di lapangan adalah pelaksanaan kurikulum 1994 dengan imbuhan label KBK.

Belum tuntas dengan KBK, di tengah krisis kepercayaan diri dan kebangsaan yang tengah melanda, kita disodori sebuah kurikulum baru yang konon memadukan antara isi dan kompetensi. Apa lagi ini?

---

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Cetakan Ke-5, P.T. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004, hal, 166

## **Liberalisasi Pendidikan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi telah mempengaruhi karakter pendidikan di Indonesia, terutama dengan ditandatanganinya kesepakatan GATT. Para pelaku utama globalisasi seperti IMF dan WTO telah memaksa Indonesia untuk memasuki kompetisi pasar bebas. Pasar bebas diyakini sebagai cara efektif untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka demi pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>6</sup> Dalam kompetisi pasar bebas semacam ini, campur tangan pemerintah terutama melalui subsidi biaya pendidikan dihilangkan. Liberalisasi pendidikan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi pihak swasta untuk bersaing secara bebas. Sekolah-sekolah swasta berlabel “unggul” dan “internasional” muncul dimana-mana. Mereka menjanjikan layanan pendidikan yang berkualitas. Sebagai implikasinya pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta merupakan pendidikan yang mahal dan nyaris tidak terjangkau oleh lapisan bawah. Pendidikan berkualitas yang seharusnya menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia, dalam praktiknya sekarang ini hanya bisa dikecap oleh mereka yang secara ekonomis mampu dan pandai. Parahnya lagi bahwa dalam era otonomi dan desentralisasi seperti ini, sekolah-sekolah negeri yang sudah seharusnya menyediakan pendidikan murah dan berkualitas, mau tidak mau dipaksa masuk dalam kompetisi pasar bebas. Sehingga yang terjadi bahwa sekolah-sekolah negeri saat ini bukanlah sekolah yang murah lagi.

### **Guruku Sayang, Guruku Malang<sup>7</sup>**

Seperti disinyalir Prof. Dr. Sudarwan Danim tentang lemahnya aspek personalia dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, harus diakui bahwa kompetensi guru di Indonesia masih sangat minim. Bila diamati lebih cermat

---

<sup>6</sup> Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, hal. xiv

<sup>7</sup> Khoe Yao Tung, *Simfoni Sedih Pendidikan Nasional*, Abdi Tandur: Jakarta, 2002, hal. 106

tentang penyebab minimnya kompetensi guru maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa profesi guru di Indonesia bukan merupakan profesi yang favorit. Menjadi guru di Indonesia akan jauh kalah gengsinya dibandingkan menjadi seorang dokter misalnya. Sehingga bukan rahasia lagi bila sebagian peminat IKIP atau FKIP memilih IKIP atau FKIP sebagai tempat studi dengan alasan “daripada tidak bersekolah” ketimbang memenuhi panggilan luhur menjadi guru.<sup>8</sup>

Rendahnya gaji guru yang berbuntut pada minimnya kesejahteraan guru merupakan refleksi dari ketidakperdulian pemerintah terhadap peran dan fungsi yang dimainkan oleh para guru. Walaupun belakangan telah ada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui penerbitan UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, namun kita semua sepakat untuk mengatakan bahwa keputusan ini dibuat sangat terlambat dan melalui proses tarik-ulur yang sangat panjang.

Guru yang sering dipahami sebagai seseorang yang patut *digugu lan ditiru*, pada kenyataannya lebih merupakan figur *wagu tur kuru*. Persepsi inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Iwan Fals melalui lagu *Omar Bakri*, figur seorang guru miskin, berperawakan kurus yang sehari-hari berkendara sepeda butut.

Ironis memang nasib (profesi) guru di Indonesia. Di satu sisi tanggung jawab besar yang diembannya, yaitu mendidik anak-anak bangsa ini, sementara di sisi lain penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap guru sangatlah tidak sepadan. Bahkan guru kerap kali dijadikan kambing hitam dalam krisis moral yang terjadi di kalangan pelajar. Label *pahlawan tanpa tanda jasa* (yang *memadai*) telah memaksa guru mencari kerja sambilan di luar jam sekolah. Akibatnya waktu luang yang harusnya digunakan untuk mempersiapkan dan mengembangkan materi pengajaran kini berkurang atau bahkan habis karena tuntutan kebutuhan hidup tadi. Guru yang seyogyanya menjadi teladan dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 82 – 84, 88

berpikir dan berperilaku kini justru mempraktikkan tindakan-tindakan tak terpuji seperti manipulasi nilai dan pembocoran soal ujian sekadar untuk mendapatkan nafkah tambahan.

### **Pengajaran yang Bersifat Formalistik Belaka**

Diakui atau tidak secara umum pendidikan di Indonesia tidak difokuskan pada pengembangan kepribadian demi penghayatan hidup yang lebih baik (*non scholae sed vitae discimus*), melainkan lebih pada sekadar pemenuhan terhadap tuntutan formal akademik sekolah (*non vitae sed scholae discimus*).<sup>9</sup> Dalam iklim PBM yang bersifat formalistik belaka guru mengajarkan pengetahuan kepada murid hanya sebatas sebagai materi yang perlu dihafalkan agar dapat lulus tes dan memperoleh nilai yang baik. Ironisnya praktik pengajaran seperti inipun juga diterapkan dalam pengajaran bidang humaniora. Sehingga hasilnya sudah dapat ditebak bahwa mata pelajaran humaniora (Lat. *humanior*) yang seyogyanya berfungsi membuat manusia lebih berbudaya telah gagal memainkan perannya.

Pemberian mata pelajaran sebagai kumpulan informasi yang harus dihafal bukan hanya tidak berguna namun juga sia-sia. Penjejalan informasi hanya sekadar sebagai setumpuk materi hafalan samasekali tidak sejalan dengan hakekat pendidikan yang sesungguhnya yaitu sebagai alat pemanusiaan manusia.

### **Pengajaran Agama yang Dogmatis**

Pendidikan agama yang diajarkan di bangku pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi saat ini adalah pendidikan yang bersifat dogmatis dan

---

<sup>9</sup> Y.B. Adimassana, "Revitalisasi Pendidikan Nilai dalam Sektor Pendidikan Formal" dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 2000, hal. 30

eksklusif. Pendidikan agama semacam ini justru telah menutup pintu bagi pemahaman akan kemajemukan yang ada.

Jauh-jauh hari sebelumnya Ki Hajar Dewantara telah mengemukakan ketidaksetujuannya untuk memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum pendidikan. Menurut tokoh pendidikan Taman Siswa ini, pengajaran agama di sekolah bertentangan dengan perkembangan rohani anak-anak dan kodrat alam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa memilih keyakinan hidup dan keyakinan agama merupakan suatu kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang dewasa dan bukannya bagi anak-anak.<sup>10</sup>

### **Peran Keluarga dalam Pendidikan Nilai dan Moral**

Tawuran antar pelajar yang menggejala dimana-mana, kasus kriminal berupa pencurian dengan tindakan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan para pelajar, merupakan bukti nyata bahwa pelajar tidak lagi sanggup mengendalikan impuls-impuls agresifnya karena ketidakmampuannya untuk berempati dengan orang lain.<sup>11</sup> Patut disesalkan bahwa dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini orang tua senantiasa memvonis guru sebagai tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Orang tua mengira bahwa pendidikan nilai dan moral menjadi tanggungjawab guru semata, sehingga masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kebobrokan moral pelajar senantiasa dihubungkan dengan kegagalan guru dalam mengajarkan nilai-nilai. Orang tua lupa bahwa sekolah dan guru hanyalah merupakan institusi pembantu orang tua dalam mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan sehingga si anak siap memasuki dunia kehidupan yang sebenarnya sebagai seorang terpelajar, sementara pendidikan nilai dan

---

<sup>10</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999, hal. 165 - 166

<sup>11</sup> .I.G.M. Drost, S.J., *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*, Kanisius; Yogyakarta: 1998, hal. 51 – 52.

moral sepenuhnya menjadi tanggungjawab orang tua.<sup>12</sup> Konsekuensinya tidaklah keliru bila kita berkeyakinan bahwa kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para pelajar sebenarnya merupakan refleksi dari kegagalan keluarga menanamkan nilai dan moral yang baik.

## MEMBUKA LEMBARAN BARU

### Hakekat dan Tujuan Pendidikan

Sebelum membuka lembaran-lembaran baru album foto pendidikan nasional, tentu sudah seharusnya bila kita sebagai perancang, pelaksana dan pemanfaat kebijakan pendidikan merenungkan kembali hakekat dan tujuan pendidikan secara kritis. Hanya dengan cara ini kita sebagai penanggungjawab dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang relevan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Sementara sebagai pelaksana dan pemanfaat kita dapat mengkritisi apakah dalam penerapannya kebijakan tersebut telah mampu mewujudkan sosok manusia Indonesia yang utuh dan berintegritas tinggi.

Pendidikan pada hakekatnya adalah alat. Pendidikan merupakan alat untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, membentuk watak, melatih ketrampilan, menanamkan nilai, memanusiakan manusia, memerdekakan manusia, menciptakan keadilan sosial, menguak rahasia alam raya, dsbnya.<sup>13</sup> Karena tujuan pendidikan sangat terkait dengan hakekat pendidikan, maka sudah seyogyanya tujuan pendidikan juga diarahkan kepada upaya menghasilkan manusia yang cerdas dan sekaligus berbudaya (*educated and civilized human being*).<sup>14</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 secara jelas menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhir, memiliki

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 32 - 35

<sup>13</sup> Francis Wahono, *op. cit.*, hal. 3.

<sup>14</sup> H.A.R. Tilaar, *op. cit.*, h. 54.



pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

### **Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Indonesia**

Dalam kaitannya dengan membuka lembaran baru foto pendidikan nasional Indonesia masa depan, penulis mengusulkan beberapa agenda reformasi dalam bidang pendidikan, yaitu: a) peningkatan alokasi dana pendidikan; b) penyusunan kurikulum berbasis masyarakat; c) penyediaan pendidikan murah dan berkualitas bagi seluruh warga; d) peningkatan kesejahteraan, profesionalisme dan citra guru; e) pengajaran untuk hidup dan bukan untuk sekolah; f) penghapusan pengajaran agama yang dogmatis; dan g) peningkatan peran keluarga dalam pendidikan nilai dan moral.

#### **Peningkatan alokasi dana pendidikan**

KTT Negara-Negara Asia yang berlangsung di New Delhi pada tahun 1993 telah memutuskan untuk mewajibkan setiap negara di Asia agar meningkatkan anggaran pendidikannya menjadi 20 - 25% dari total anggaran negara. Walaupun belakangan ini telah ada upaya pemerintah untuk meningkatkan dana pendidikan nasional sebesar 20% dari dana total APBN, namun dalam praktiknya sebagian besar anggaran terserap untuk membiayai gaji guru ketimbang melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang ada, meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan kompetensi guru, dll. Selain itu di daerahpun kita melihat adanya ketimpangan antara alokasi anggaran biaya pendidikan dan sektor-sektor lainnya. Kenyataan yang ada bahwa belum

semua kota/kabupaten telah mengalokasikan dana APBD sekitar 20% untuk pendidikan.

Karena sekali lagi pendidikan merupakan cara yang tepat untuk membebaskan bangsa ini dari kungkungan krisis ekonomi, sosial dan kebangsaan yang parah, maka jauh lebih baik meningkatkan anggaran biaya pendidikan ketimbang memberi perhatian pada pos-pos lain yang kurang bermanfaat dengan catatan bahwa harus ada pengawasan penggunaan anggaran yang ketat. Juwono Sudarsono pada saat menjabat pertamakali sebagai Menteri Pendidikan bahkan pernah mengatakan bahwa Departemen Pendidikan merupakan salah satu lembaga yang paling rentan terhadap korupsi. Sinyalemen ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa memperbesar alokasi anggaran pendidikan tanpa disertai pengawasan yang ketat terhadap penggunaan uang yang ada hanyalah akan berlangsung sia-sia. Anggaran pendidikan yang besar hanya akan memperkaya oknum-oknum di lingkungan Departemen Pendidikan tanpa berimbas pada peningkatan kualitas masyarakat secara menyeluruh.

### **Penyusunan kurikulum berbasis masyarakat**

Walaupun penyusunan kurikulum KBK telah bersifat desentralistik namun dalam evaluasinya masih bersifat sentralistik, yaitu melalui Ujian Akhir Nasional (UAN). Sehingga yang terjadi bahwa dalam UAN parameter keberhasilan adalah kompetensi kognitif siswa saja dan mengabaikan kompetensi psikomotorik dan afektif siswa. Sudah seyogyanya bila di masa mendatang penyusunan materi hingga evaluasi kurikulum sepenuhnya diserahkan kepada para guru daerah karena merekalah yang mengetahui secara tepat kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemerintah dengan segala keunggulan dan kelengkapannya diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai fasilitator serta melakukan pelatihan, pembimbingan dan pengawasan terhadap kinerja para guru di daerah. Sehingga diharapkan bahwa dengan keragaman

penyusunan kurikulum yang ada tetap dapat memenuhi standar kualitas pendidikan yang ideal.

### **Penyediaan pendidikan murah dan berkualitas bagi seluruh warga**

Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Namun dalam praktiknya dengan diberlakukannya liberalisasi pendidikan, kesempatan untuk menikmati sekolah yang berkualitas menjadi semakin langka terutama bagi mereka yang secara ekonomis lemah. Lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri kini berlomba-lomba untuk memasuki kompetisi pasar bebas pendidikan yang keras. Sebagai implikasinya biaya pendidikan membumbung tinggi dan kesempatan menikmati pendidikan merupakan sesuatu yang eksklusif dan mewah.

Industrialisasi dalam bidang pendidikan sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar sejauh tetap memberikan porsi bagi mereka yang secara ekonomis terpinggirkan. Bila pemerintah teringat kembali akan tanggungjawabnya dalam memberikan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, maka sudah seyogyanya bila sekolah-sekolah pemerintah memberikan kesempatan menikmati pendidikan bagi mereka yang miskin bukan berdasarkan prestasi akademiknya, namun lebih kepada pemenuhan haknya. Itu artinya sekolah-sekolah pemerintah unggul di masa mendatang tidak hanya menyeleksi masuk calon siswanya berdasarkan capaian akademik saja, misalnya melalui Nilai Ebtanas Murni (NEM), tapi juga menyisihkan beberapa kelas terpisah bagi mereka yang secara akademik dan ekonomis tersisihkan. Konsep Robin Hood – seorang pahlawan rakyat yang merampok harta orang-orang kaya hasil pemerasan untuk dibagi-bagikan kepada kaum miskin – menurut penulis masih layak dipertahankan dan dimanfaatkan. Mereka yang secara ekonomis mampu wajib mensubsidi mereka yang berkekurangan.

## Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas guru

Kesejahteraan dan profesionalisme merupakan dua mata rantai yang tidak terpisahkan. Menuntut guru untuk meningkatkan profesionalismenya namun tanpa diimbangi penghargaan yang cukup atas jerih payahnya merupakan salah satu bentuk eksploitasi manusia yang terselubung. Cukup lama kita mendengar elegi tentang guru yang harus mencari pekerjaan sambilan di luar pekerjaan tetapnya sebagai guru karena minimnya penghasilan yang diperoleh. Bersyukur bahwa syair ratapan ini berakhir dengan ditetapkan dan diberlakukannya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen. Sedikit banyak melalui pengesahan UU ini pemerintah telah menunjukkan itikad baiknya di bidang peningkatan kesejahteraan para pendidik.

Kita semua berharap bahwa dengan diberlakukannya UU No. 14 tahun 2005 ini akan mengubah citra guru dan IKIP/FKIP. Diharapkan bahwa profesi guru di masa mendatang bukan merupakan profesi nomor dua atau nomor ke sekian, tapi profesi yang didambakan setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian para mahasiswa dan lulusan IKIP/FKIP akan menjadi kader-kader guru terbaik Indonesia masa depan yang dapat mengubah wajah pendidikan nasional. Seperti yang dikatakan oleh Khoe Yao Tung dalam bukunya *Simfoni Sedih Pendidikan Indonesia*<sup>15</sup>, profil guru Indonesia masa depan yang kita harapkan adalah profil sbb:

- Pemikir: kritis, kreatif dan independen dalam mengolah dan menyeleksi informasi.
- Pembelajar seumur hayat: senantiasa mengasah dan meningkatkan kemampuan dan keahliannya untuk meningkatkan kompetensi muridnya dalam menghadapi ketatnya kompetisi dunia.
- Pekerja tim: mampu menggunakan sumber daya informasi dalam lingkungan tantangan pendidikan untuk tujuan bersama.

---

<sup>15</sup> Khoe Yao Tung, *op. cit.*, hal. 86, 88

- Pekerja yang loyal dan berdedikasi tinggi: memiliki komitmen yang tinggi akan pekerjaannya, bertanggungjawab serta berorientasi pada pelayanan yang memuaskan (dalam hal ini terhadap siswa didik).

### **Pengajaran untuk hidup dan bukan untuk sekolah**

Pengajaran di masa mendatang diharapkan akan mengikuti pola pengajaran yang memberdayakan siswa didik. Konsep pengajaran lama yang menekankan pada penguasaan materi hanya sekedar untuk memperoleh nilai yang baik dan lulus tes sudah seharusnya ditinggalkan. Dalam konteks pengajaran yang baru, kreativitas, kebebasan berpendapat dan berpikir, kebebasan untuk tidak menjadi sama dengan orang lain, haruslah mendapat tempat yang cukup. Dalam konsep pengajaran masa mendatang guru hanyalah seorang fasilitator dan bukannya narasumber tunggal. Siswa bukanlah obyek melainkan subyek dari pendidikan, sehingga relasi antara guru dan siswa bukan merupakan relasi hirarkis melainkan relasi kolegial.

### **Penghapusan pengajaran agama yang dogmatis**

Pengajaran agama yang bersifat dogmatis sudah selayaknya dihapuskan karena tidak memberi kontribusi samasekali bagi pembentukan pergaulan ideal dalam masyarakat yang majemuk. Apabila pengajaran agama ingin tetap dipertahankan dan dimasukkan ke dalam kurikulum maka sudah seyogyanya merupakan pengajaran agama yang bersifat dialogis. Pengajaran agama yang memberi ruang bagi diskusi-diskusi di seputar tugas dan tanggung jawab setiap warga negara yang beragam dalam membangun pergaulan sosial yang lebih baik. Dalam diskusi semacam ini pendekatan dogmatis tidak dipertimbangkan samasekali, karena agama merupakan ranah yang sensitif untuk didiskusikan oleh masing-masing penganutnya.

## Peningkatan peran keluarga dalam pendidikan nilai dan moral.

Keluarga yang baik menanamkan nilai dan moral yang baik kepada anak didiknya seperti yang dituliskan oleh Dorothy Law Nottle dalam puisinya<sup>16</sup>:

- Jika seorang anak hidup dalam suasana penuh kritik,  
ia belajar untuk menyalahkan.
- Jika seorang anak hidup dalam permusuhan,  
ia belajar untuk berkelahi.
- Jika seorang anak hidup dalam ketakutan,  
ia belajar untuk gelisah.
- Jika seorang anak hidup dalam belas kasihan diri,  
ia belajar mudah memaafkan dirinya sendiri.
- Jika seorang anak hidup dalam ejekan,  
ia belajar untuk merasa malu.
- Jika seorang anak hidup dalam kecemburuan,  
ia belajar untuk iri hati.
- Jika seorang anak hidup dalam rasa malu,  
ia belajar untuk merasa bersalah.
- Jika seorang anak hidup dalam semangat jiwa besar,  
ia belajar untuk percaya diri.
- Jika seorang anak hidup dalam menghargai orang lain,  
ia belajar untuk setia dan sabar.
- Jika seorang anak hidupnya diterima apa adanya,  
ia belajar untuk mencintai.
- Jika seorang anak hidup dalam suasana rukun,  
ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri.
- Jika seorang anak hidupnya dimengerti,  
ia belajar bahwa sangat baik untuk mempunyai cita-cita.
- Jika seorang anak hidup dalam suasana adil,  
ia belajar akan kemurahan hati.
- Jika seorang anak hidup dalam kejujuran dan sportivitas,  
ia belajar akan kebenaran dan keadilan.

---

<sup>16</sup> .I.G.M. Drost, S.J., *op. cit.*, hal. 66 - 67

Jika seorang anak hidup dalam rasa aman,  
ia belajar percaya kepada dirinya dan percaya kepada orang lain.  
Jika seorang anak hidup dalam persahabatan,  
ia belajar bahwa dunia ini merupakan suatu tempat yang indah untuk hidup  
Jika kamu hidup dalam ketentraman,  
anak-anakmu akan hidup dalam ketenangan batin.

Karena itu amatlah salah menyerahkan tugas dan tanggungjawab utama keluarga dalam menanamkan budi pekerti yang baik kepada sekolah dan guru. Sekolah mengajarkan ilmu pengetahuan agar anak menjadi matang secara intelektual, sementara keluarga menanamkan nilai dan moral sehingga anak menjadi matang secara emosional dan spiritual.

## **PENUTUP DAN KESIMPULAN**

Peringatan hari Pendidikan Nasional Indonesia sudah berada di ambang pintu. Lembaran-lembaran lama album foto pendidikan nasional Indonesia sudah sewajarnya ditutup dan saatnya bagi kita kini untuk membuka lembaran baru yang menjanjikan harapan baru. Bila Kofi Annan dalam salah satu pidatonya, mengatakan bahwa pendidikan adalah gerbang awal kemajuan suatu bangsa, maka inilah saatnya bagi kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan dengan membenahi sistem pendidikan nasional Indonesia yang carut marut. Elvis Presley dalam salah satu lagunya berkata "*it's now or never,*" saat ini atau tidak samasekali.

**Salatiga, 7 Maret 2006**

## A. Daftar Pustaka

1. Tilaar, H.A.R.  
2000 **Paradigma Baru Pendidikan Nasional**, P.T. Rineka Cipta: Jakarta
2. Machfoeds, Mas'ud  
2004 **Pendidikan Dasar Harus Tetap menjadi Prioritas**, Harian Umum Keadaulatan Rakyat tanggal 2 September
3. Danim, Prof. Dr. Sudarwan  
2003 **Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan**, Pustaka Pelajar: Yogyakarta,
4. Hamzah, Ardi  
2004 **Makin Kusutnya Pendidikan di Negeri Ini**, Harian Keadaulatan Rakyat tanggal 8 Desember
5. Mulyasa, E.  
2004 **Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi**, Cetakan Ke-5, P.T. Remaja Rosdakarya: Bandung
6. Wahono, Francis  
2001 **Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan**, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
7. Tung, Khoe Yao  
2002 **Simfoni Sedih Pendidikan Nasional**, Abdi Tandur: Jakarta
8. Atmadi, A. dan Y. Setyaningsih (ed)  
2000 **Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga**, Penerbit Kanisius: Yogyakarta
9. Darmaningtyas  
1999 **Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis**, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
10. Drost, S.J., I.G.M.,  
1998 **Sekolah: Mengajar atau Mendidik**, Kanisius; Yogyakarta